



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya, entitas bank syariah di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1983 dengan keluarnya Paket Desember 1983 (Pakdes 83) yang berisi sejumlah regulasi di bidang perbankan, dimana salah satunya ada peraturan yang memperbolehkan bank memberikan kredit dengan bunga 0% (*zero interest*). Perkembangan dimaksud diikuti oleh serangkaian kebijakan di bidang perbankan oleh Menteri Keuangan Radius Prawiro yang tertuang dalam Paket Oktober 1988 (Pakto 88). Pakto 88 intinya merupakan deregulasi perbankan yang memberikan kemudahan bagi pendirian bank-bank baru, sehingga industri perbankan pada waktu itu mengalami pertumbuhan yang sangat pesat.¹

Industri perbankan yang pertama menggunakan sistem syariah adalah PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, yang didirikan pada tahun 1991 dan memulai kegiatan operasionalnya pada bulan Mei 1992. Pendirian bank dimaksud, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pemerintah Indonesia, serta mendapat dukungan nyata dari eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim se Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim. Selanjutnya, pada tahun 1998 dikeluarkan UU No. 10 Tahun 1998 sebagai amandemen dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang memberikan

¹Ali Syukron, "Dinamika Perkembangan Bank Syariah di Indonesia", *Economic, Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2, 2013, hlm. 28.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

landasan hukum yang lebih kuat bagi keberadaan sistem perbankan syariah. Pada tahun 1999 dikeluarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia untuk dapat menjalankan tugasnya berdasarkan Prinsip Syariah.²

Selanjutnya, tepat pada tanggal 16 Juli 2008, pengesahan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dilakukan oleh DPR. Pengesahan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dilakukan mengingat bahwa belum spesifiknya pengaturan perbankan syariah di dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.³

Sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan beralih dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagaimana disahkannya dan dituangkan dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Undang-Undang ini disahkan dalam rangka mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, sehingga diperlukan penyelenggara kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang

²Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Ed. 1, Cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 10-13.

³Darsono, dkk, *Perbankan Syariah di Indonesia: Kelembagaan dan Kebijakan serta Tantangan ke Depan*, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. xxiv.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

memiliki fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara terpadu, independen dan akuntabel.⁴

Setelah terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka dikeluarkannya peraturan terbaru yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.64/PJOK/03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah. Pasal 2 angka 1 menjelaskan bahwa bank konvensional dapat melakukan perubahan usaha menjadi Bank Syariah dan Pasal 1 angka 2 juga menjelaskan perubahan kegiatan usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah dapat dilakukan a) Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah, atau b) BPR menjadi BPRS.⁵

Dalam perkembangan bank syariah mengalami beberapa kendala diantaranya adalah rendahnya *market share* perbankan syariah yang total asetnya baru mencapai 5,35 persen dari seluruh total aset bank di perbankan nasional sehingga menyebabkan peran bank syariah dalam memberdayakan perekonomian umat menjadi kurang optimal. Kondisi saat ini pertumbuhan aset perbankan syariah terkesan melambat, sehingga perkembangan laju pertumbuhannya tidak begitu pesat seperti tahun-tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena perbankan syariah terkesan mengerem penerimaan dana pihak ketiga (DPK) karena bank syariah tidak melakukan pembiayaan secara

⁴*Ibid.*, hlm. xxv.

⁵Otoritas Jasa Keuangan, "Regulasi Perbankan Syariah PJOK Nomor 64/PJOK.03/2016", dikutip dari www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi-perbankan-syariah/Pages/PJOK-tentang-Perubahan-kegiatan-usaha-Bank-Konvensional-Menjadi-Bank-Syariah.asp, pada hari Selasa, 5 Desember 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyeluruh kepada pengusaha karena terkait asas *prudential banking* dan prospek usaha yang kurang bagus.⁶

Tabel I. 1:
Pangsa Perbankan Syariah Terhadap Total Bank (Miliar Rupiah)

	Islamic Banks		Total Banks
	Nominal	Share	
Total Assets	420.248	5,35%	7.850.139
Deposit Fund	201.089	3,94%	5.108.490
Credit/Financing	153.030	2,07%	7.385.853
FDR/LDR	89,59%		80,07%

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2018.

Dari data di atas dapat dilihat bahwa Bank syariah mempunyai peluang yang sangat besar untuk menggerakkan ekonomi ummat, karena tingkat rasio penyaluran dana pihak ketiga (FDR) kepada nasabah pada bank syariah cukup besar, yaitu sebesar 89,59 persen lebih tinggi daripada bank konvensional rata-rata sebesar 80,07 persen. Dengan tingginya tingkat FDR tersebut, bank syariah mempunyai peluang yang besar untuk menumbuhkan iklim investasi dan jiwa entrepreneurship nasabah yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan dan mengurangi pengangguran di masyarakat. Masih rendahnya total asset bank syariah disebabkan oleh faktor-faktor antara lain yaitu: Pertama, kurangnya sosialisasi dan pengetahuan masyarakat tentang produk-produk bank syariah, sehingga banyak masyarakat yang belum menggunakan jasa layanan keuangan bank syariah. Kedua, terbatasnya pakar

⁶Dakwah Syariah, "Peran Stakeholder Perbankan Syariah", dikutip dari www.dewansyariah.blogspot.co.id, pada hari Jum'at, 01 Desember 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan SDM yang ahli dalam perbankan syariah. Ketiga, kurang inovatif dan minimnya produk yang dapat mengakomodir kebutuhan nasabah. Keempat, sistem regulasi atau perundang-undangan yang belum memadai. Kelima, dukungan Pemerintah dinilai masih kurang dalam upaya pengembangan bank syariah. Hal ini dilihat dari sisi alokasi dana yang dikeluarkan untuk edukasi, sosialisasi dan promosi tentang bank syariah masih sangat minim. Keenam, kurangnya instrumen moneter yang berbasis syariah untuk membantu kebutuhan likuiditas dan instrumen investasi bank syariah. Ketujuh, terjadi pajak ganda dalam suatu transaksi produk pembiayaan di bank syariah (murabahah), sehingga menyebabkan produk tersebut kurang kompetitif.⁷

Selain masalah tersebut bank syariah juga kurang memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya memberdayakan ekonomi umat, hal ini terlihat dari portofolio pembiayaannya yang masih didominasi oleh pembiayaan non-bagi hasil, yaitu pembiayaan murabahah dan ijarah. Hal ini terlihat dalam statistik pembiayaan bank syariah, bahwa tingkat pembiayaan murabahah hampir mencapai 60 persen, sedangkan pembiayaan bagi hasil (musyarakah dan mudharabah) hanya mencapai sekitar 35 persen.⁸

Dengan kondisi tersebut sungguh ironis, karena berdasarkan prinsip dasar produk tersebut, bank syariah sesungguhnya memiliki *core product* pembiayaan bagi hasil, yang dikembangkan dalam produk pembiayaan musyarakah dan mudharabah. Hal ini berarti keberadaan bank syariah harus

⁷*Ibid.*,

⁸*Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

mampu memberikan kontribusi yang meningkatkan pertumbuhan sektor riil. Fungsi tersebut akan terwujud bila bank syariah menggunakan akad profit and loss sharing (mudharabah dan musyarakah) sebagai *core product*-nya.⁹

Menurut Beik (2007), tingginya pembiayaan non-bagi hasil dapat menyebabkan kemungkinan terjadinya inflasi, dimana harga komoditas barang cenderung meningkat selain itu, skema murabahah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan produktivitas barang dan jasa. Tingginya pembiayaan non-bagi hasil tidak hanya menimbulkan masalah bagi dunia usaha, tetapi juga mengakibatkan rendahnya perolehan pendapatan bank syariah itu sendiri, karena walaupun dengan risiko yang lebih tinggi produk pembiayaan bagi hasil dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar daripada produk pembiayaan non-bagi hasil, yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan bank syariah itu sendiri. Selain itu menurut Agustianto (2007), pembiayaan non bagi hasil sesungguhnya tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan sektor riil, karena bentuknya dominan konsumtif. Dengan tingginya pembiayaan non bagi hasil, mengindikasikan bank syariah terkesan sangat menghindari risiko.¹⁰

Peningkatan daya saing bank syariah tidak hanya dilihat dari jumlah total asset saja, tetapi dilihat dari kemampuan untuk memberikan manfaat dan nilai tambah kepada nasabah serta mampu memberdayakan perekonomian umat secara umum. Sehingga upaya pengembangan bank syariah diharapkan dapat menyelaraskan pertumbuhan *market share* dan permodalan yang kuat

⁹*Ibid.*,
¹⁰*Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan tetap memberikan dampak yang positif terhadap perekonomian umat yang sesuai prinsip syariah melalui pembiayaan yang berkualitas yang mampu memberikan manfaat kepada umat.¹¹

Upaya pengembangan kinerja dan daya saing industri perbankan syariah membutuhkan peran serta dan komitmen yang kuat dari stakeholder perbankan syariah, yaitu pemerintah, manajemen dan karyawan perbankan syariah, maupun masyarakat umum. Sehingga perlu dilakukan sinergisitas peran masing-masing pemegang kepentingan untuk saling bekerja sama mengembangkan industri perbankan syariah.¹²

Selain itu, perkembangan bank syariah nasional pada saat ini memang masih jauh dari harapan. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga saat ini saja total asset perbankan syariah baru mencapai 5,18% dari total nilai asset perbankan secara nasional. Hal tersebut membuat Indonesia hanya mampu berada di urutan ke-9 dari 10 negara Islam lainnya dari sisi asset industri jasa keuangan syariah. Menurut Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), ada kelemahan yang memicu perbankan syariah Indonesia lambat berkembang. Perbankan syariah saat ini hanya memfokus pada fungsi sebagai bank komersial biasa, namun tidak memaksimalkan fungsi sebagai bank investasi. Di sisi lain, bank syariah yang ada saat ini juga dinilai cenderung tertuju pada penyaluran kredit jangka pendek seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), begitu juga dari sisi simpanan. Bank syariah saat ini

¹¹*Ibid.*,

¹²*Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

masih takut mengembangkan produk-produk pembiayaan yang biasanya membutuhkan modal besar, seperti halnya kredit rumah.¹³

Oleh Karena itu, Bank Indonesia dan stakeholder perbankan syariah telah membuat cetak biru pengembangan perbankan syariah di Indonesia demi kemajuan perbankan syariah secara nasional. Pada cetak biru pengembangan perbankan syariah ini terdapat enam pilar pengembangan perkembangan syariah, yaitu, 1) Struktur perbankan syariah yang sehat, 2) Terpenuhinya prinsip kehati-hatian dan kepatuhan syariah, 3) Sistem pengawasan yang independen dan efektif, 4) Industri perbankan syariah yang kuat, 5) Infrastruktur pendukung yang mencukupi, 6) Perlindungan nasabah.¹⁴

Beranjak dari latar belakang masalah di atas penulis tertarik mengkaji lebih dalam tentang peran stakeholder perbankan syariah yang kemudian penulis tuangkan ke dalam sebuah karya tulis ilmiah yang berjudul: **“Analisis Peran Stakeholder Perbankan Syariah Sebagai Upaya Meningkatkan Kinerja Bank Syariah”**.

B. Definisi Istilah

1. Stakeholder

Beberapa definisi yang penting dikemukakan seperti Freeman (1984), yang mendefinisikan stakeholder sebagai kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi dan atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan tertentu. Sedangkan Biset (1998), secara singkat mendefinisikan

¹³Detik Finance, “Perbankan Syariah RI Lambat Berkembang”, dikutip dari <https://finance.detik.com>, pada hari Senin, 4 Desember 2017.

¹⁴Ali Syukron, *Op.Cit.*, hlm. 35-38.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

stakeholder merupakan orang dengan suatu kepentingan atau perhatian pada permasalahan. Stakeholder ini sering diidentifikasi dengan suatu dasar tertentu sebagaimana dikemukakan Freeman (1984), yaitu dari segi kekuatan dan kepentingan relatif stakeholder terhadap isu, Grimble and Wellard (1996), dari segi posisi penting dan pengaruh yang dimiliki mereka. Menurut ISO 26000 SR, stakeholder didefinisikan “Individu atau kelompok yang memiliki kepentingan terhadap keputusan serta aktivitas organisasi” sedangkan menurut standard pengelolaan stakeholder AA1000 SES, definisinya adalah “Kelompok yang dapat mempengaruhi dan/atau terpengaruh oleh aktivitas, produk atau layanan, serta kinerja organisasi.”¹⁵

Pandangan-pandangan di atas menunjukkan bahwa pengenalan stakeholder tidak sekadar menjawab pertanyaan siapa stakeholder suatu isu tetapi juga sifat hubungan stakeholder dengan isu, sikap, pandangan, dan pengaruh stakeholder itu. Aspek-aspek ini sangat penting dianalisis untuk mengenal stakeholder.

2. Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Umum Syariah (BUS) merupakan bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Sedangkan Bank

¹⁵Wikipedia, “Pemangku Kepentingan”, dikutip dari <https://id.wikipedia.org>, pada hari Jum’at, 01 Desember 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.¹⁶

3. Kinerja

Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai tanggung jawab yang diberikan padanya. Kinerja juga dapat diartikan sebagai cara atau kemampuan individu dalam bekerja untuk dapat memberikan hasil yang memuaskan ditempatnya bekerja dalam satu paket atau bagian pekerjaan tertentu atau pada suatu periode waktu tertentu.¹⁷

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan gejala-gejala yang dikemukakan di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah penelitian dalam bentuk beberapa pertanyaan sebagai berikut:

- a. Perbankan syariah saat ini hanya memfokuskan pada fungsi sebagai bank komersial saja, namun tidak memaksimalkan fungsi sebagai bank investasi.
- b. Bank syariah masih cenderung tertuju pada penyaluran kredit jangka pendek seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), begitu juga dari sisi simpanan.

¹⁶Ikit, *Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah*, Ed. 1, Cet.1, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 44.

¹⁷Timotius Duha, *Perilaku Organisasi*, Ed. 1, Cet. 2, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 218.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Bank syariah masih takut untuk mengembangkan produk-produk pembiayaan yang biasanya membutuhkan modal besar, seperti halnya kredit rumah.
- d. Masih rendahnya *market share* perbankan syariah dari seluruh total asset bank di perbankan nasional sehingga menyebabkan peran bank syariah dalam memberdayakan perekonomian umat menjadi kurang optimal.
- e. Bank syariah masih kurang memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya memberdayakan ekonomi umat, hal ini terlihat dari portofolio pembiayaannya yang masih didominasi oleh non-bagi hasil, yaitu pembiayaan murabahah dan ijarah.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, dan mengingat banyaknya kendala dan berbagai keterbatasan pada peneliti, maka penelitian ini perlu adanya pembatasan masalah yang akan diteliti sehingga tidak terlalu luas dan terarah. Untuk itu penelitian ini dibatasi hanya pada peran stakeholder perbankan syariah yang terdiri dari pemerintah, manajemen, karyawan dan masyarakat di Kota Pekanbaru

3. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana peran stakeholder perbankan syariah sebagai upaya meningkatkan kinerja bank syariah?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Apa saja kendala dan solusi dalam melaksanakan peran stakeholder perbankan syariah sebagai upaya meningkatkan kinerja bank syariah?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini secara umum adalah:

- a. Untuk menganalisis peran stakeholder perbankan syariah sebagai upaya meningkatkan kinerja bank syariah.
- b. Untuk menganalisis kendala dan solusi dalam melaksanakan peran stakeholder perbankan syariah sebagai upaya meningkatkan kinerja bank syariah.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis

- a. Sebagai bahan kajian untuk mengembangkan peran stakeholder perbankan syariah.
- b. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu referensi bagi peneliti selanjutnya yang melakukan kajian masalah yang sama, juga dapat digunakan untuk mengetahui kadar objektivitas temuan-temuan penelitian sejenis dan tempat berbeda.

2. Kegunaan Secara Praktis

- a. Dapat menjadi bahan masukan bagi stakeholder perbankan syariah dalam meningkatkan kinerja bank syariah.
- b. Dapat menambah wawasan pengetahuan dan meningkatkan kinerja stakeholder perbankan syariah untuk meningkatkan kualitas kinerja bank syariah.